



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN  
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. berdasarkan Diktum Keenam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 dan Nomor 177 tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 130 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 dan Nomor 177 tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahn Tahun Anggran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);

19. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 935.495.364.126,- mengalami penambahan sebesar Rp. 2.575.454.615,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 938.070.818.741,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp.857.669.710.158,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.736.197.615,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah perubahan	Rp.860.405.907.773,-

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah perubahan	Rp.923.696.297.656,-
-------------------	----------------------

2. Belanja

a. Belanja Operasional

Semula	Rp. 631.277.375.206,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.430.143.000,-</u>
Jumlah belanja operasional	
Setelah perubahan	Rp.634.707.518.206,-

b. Belanja Modal

Semula	Rp. 222.846.812.620,-
--------	-----------------------

Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(856.578.385,-)</u>
Jumlah belanja Modal	
Setelah perubahan	Rp. 221.990.234.235,-
c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp. 3.810.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	
Setelah perubahan	Rp. 3.810.000.000,-
d. Belanja Transfer	
Semula	Rp. 77.561.176.300,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	
Setelah perubahan	Rp. 77.561.176.300,-
Jumlah belanja Daerah	
Setelah perubahan	Rp. 938.068.928.741,-
Surplus / (Defisit) Setelah perubahan	Rp. (14.372.631.085,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp. 22.042.779.254,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>(162.633.000,-)</u>
Setelah perubahan	Rp. 21.880.146.254,-
Jumlah pembiayaan Netto	
Setelah perubahan	Rp. 14.372.631.085,-
Sisa lebih pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp 0,-

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 5 Agustus 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
Pada tanggal 5 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

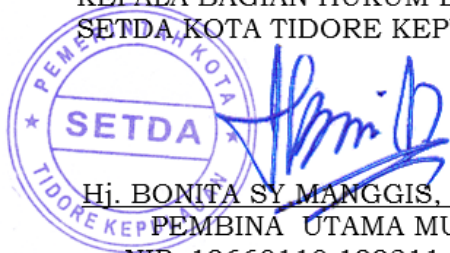
Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 568.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

The image shows a circular official stamp of the SETDA (Setoran Daerah) of Kota Tidore Kepulauan. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 24 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)	PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	
1	2	3	4	5=4-3	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>46.113.789.883</b>	<b>46.113.789.883</b>	<b>-</b>	
<b>4.1.1.</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>8.250.000.000</b>	<b>8.250.000.000</b>	<b>-</b>	
4.1.1.01.	Pajak Hotel	80.000.000	80.000.000	-	
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.350.000.000	1.350.000.000	-	
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	20.000.000	20.000.000	-	
4.1.1.04.	Pajak Reklame	100.000.000	100.000.000	-	
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000	4.000.000.000	-	
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.065.000.000	1.065.000.000	-	
4.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.400.000.000	1.400.000.000	-	
4.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	235.000.000	235.000.000	-	
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>5.654.699.600</b>	<b>5.654.699.600</b>	<b>-</b>	
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.711.906.600	1.711.906.600	-	
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.837.793.000	3.837.793.000	-	
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	105.000.000	105.000.000	-	
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain PAD Yang Sah</b>	<b>32.209.090.283</b>	<b>32.209.090.283</b>	<b>-</b>	
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	177.500.000	177.500.000	-	
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000	1.500.000.000	-	
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian	800.000.000	800.000.000	-	
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	25.731.590.283	25.731.590.283	-	
4.1.4.19.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.000.000.000	4.000.000.000	-	
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>857.669.710.158</b>	<b>860.405.907.773</b>	<b>2.736.197.615</b>	
<b>4.2.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>849.588.070.856</b>	<b>852.324.268.471</b>	<b>2.736.197.615</b>	
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	773.880.312.856	776.616.510.471	2.736.197.615	
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum	602.187.400.856	602.187.400.856	-	
4.2.1.01.02	Dana Transfer Khusus	171.692.912.000	174.429.109.615	2.736.197.615	
4.2.1.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	27.159.466.000	27.159.466.000	-	
4.2.1.06.	Dana Desa	48.548.292.000	48.548.292.000	-	
<b>4.2.2.</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>8.081.639.302</b>	<b>8.081.639.302</b>	<b>-</b>	
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	8.081.639.302	8.081.639.302	-	
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>-</b>	
<b>4.3.1.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>-</b>	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.500.000.000	4.500.000.000	-	
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.676.600.000	12.676.600.000	-	

	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	920.960.100.041	923.696.297.656	2.736.197.615
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			-
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>631.277.375.206</b>	<b>634.707.518.206</b>	<b>3.430.143.000</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>372.839.328.804</b>	<b>372.763.328.804</b>	<b>(76.000.000)</b>
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	289.583.207.706	289.583.207.706	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	18.923.370.048	18.923.370.048	-
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000	601.600.000	-
5.1.1.04.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	400.000.000	400.000.000	-
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	275.234.980	275.234.980	-
5.1.1.06.	Gaji dan Tunjangan DPRD	11.238.420.730	11.238.420.730	-
5.1.1.07.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	281.305.290	281.305.290	-
5.1.1.08.	Honorarium PNS	18.575.775.070	18.551.775.070	(24.000.000)
5.1.1.08.05	Honorarium Tim	6.290.304.070	5.078.873.950	(4.000.000)
5.1.1.08.06	Honorarium Petugas / Penjaga	5.916.154.000	5.362.430.000	(20.000.000)
5.1.1.09.	Honorarium Non PNS	32.960.414.980	32.908.414.980	(52.000.000)
5.1.1.09.02	Honorarium peserta kegiatan	4.919.485.000	3.201.570.000	(45.000.000)
5.1.1.09.05	Honorarium Petugas / Penjaga	11.556.690.000	10.786.660.000	(7.000.000)
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>232.798.646.402</b>	<b>236.304.789.402</b>	<b>3.506.143.000</b>
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.178.054.821	11.177.342.821	(712.000)
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.357.801.885	4.856.773.687	(712.000)
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.925.514.509	7.923.014.509	(2.500.000)
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.766.846.279	1.738.696.279	(2.500.000)
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.409.060.940	32.467.060.940	3.058.000.000
5.1.2.03.13	Belanja Jasa Kesehatan	14.893.569.140	17.951.569.140	3.058.000.000
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.418.250.000	4.418.250.000	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.423.811.300	7.423.811.300	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.394.602.960	7.391.282.960	(3.320.000)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	4.419.453.260	3.208.269.860	(3.100.000)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.975.149.700	2.358.156.959	(220.000)
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.290.915.000	1.269.765.000	(21.150.000)
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	863.340.000	267.600.000	(21.150.000)
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.077.924.000	2.070.724.000	(7.200.000)
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.018.324.000	694.249.500	(6.000.000)
5.1.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.059.600.000	596.700.000	(1.200.000)
5.1.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	25.000.000	25.000.000	-
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.174.629.490	1.174.629.490	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.387.993.000	19.324.668.000	(63.325.000)
5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.427.349.000	6.750.920.700	(63.325.000)
5.1.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	557.270.000	557.270.000	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	64.800.000	64.800.000	-
5.1.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.400.493.450	1.370.693.450	(29.800.000)
5.1.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	338.885.000	222.835.000	3.500.000
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	348.383.450	39.433.450	(8.000.000)
5.1.2.14.07	Belanja pakaian semi jas	83.250.000	59.250.000	(24.000.000)
5.1.2.14.09	Belanja atribut pakaian	224.815.000	29.400.000	(1.300.000)
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.428.179.549	74.420.329.549	(7.850.000)
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.839.905.499	13.379.392.841	(7.850.000)
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	265.697.000	265.697.000	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	5.127.739.600	5.127.739.600	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.859.709.100	22.859.709.100	-
5.1.2.22.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.157.265.000	1.157.265.000	-
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	916.000.000	916.000.000	-
5.1.2.24.	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.760.246.400	3.744.246.400	(16.000.000)
5.1.2.24.03	Belanja Instruktur	515.300.000	389.600.000	(16.000.000)
5.1.2.25.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.575.740.000	5.175.740.000	600.000.000
5.1.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	1.581.300.000	2.181.300.000	600.000.000
5.1.2.28.	Belanja Barang Dana PAUD	250.200.000	250.200.000	-
5.1.2.29.	Belanja Barang Dana BLUD	25.731.590.283	25.731.590.283	-

<b>5.1.5.</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>25.289.400.000</b>	<b>25.289.400.000</b>	<b>-</b>
5.1.5.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	19.500.000.000	19.500.000.000	-
5.1.5.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.525.000.000	1.525.000.000	-
5.1.5.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	4.264.400.000	4.264.400.000	-
<b>5.1.6.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>-</b>
5.1.6.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat	350.000.000	350.000.000	-
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.846.812.620</b>	<b>221.990.234.235</b>	<b>(856.578.385)</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>2.099.420.000</b>	<b>2.099.420.000</b>	<b>-</b>
5.2.1.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	119.420.000	119.420.000	-
5.2.1.20.	Belanja Modal Perolehan Aset Tanah	1.980.000.000	1.980.000.000	-
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>45.895.666.670</b>	<b>45.895.666.670</b>	<b>-</b>
5.2.2.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.959.500.000	2.959.500.000	-
5.2.2.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	313.000.000	313.000.000	-
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.592.619.700	2.592.619.700	-
5.2.2.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	21.500.000	21.500.000	-
5.2.2.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	43.200.000	43.200.000	-
5.2.2.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	4.000.000	4.000.000	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	390.233.950	390.233.950	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.870.808.080	1.870.808.080	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.703.743.830	5.703.743.830	-
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.559.705.400	2.559.705.400	-
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	668.787.000	668.787.000	-
5.2.2.21.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	28.105.064.360	28.105.064.360	-
5.2.2.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.500.000	4.500.000	-
5.2.2.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	401.850.000	401.850.000	-
5.2.2.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15.000.000	15.000.000	-
5.2.2.70.	Belanja Modal Perolehan Aset Peralatan dan Mesin	168.799.500	168.799.500	-
5.2.2.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	73.354.850	73.354.850	-
<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>58.607.224.000</b>	<b>57.924.141.015</b>	<b>(683.082.985)</b>
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.229.425.885	40.600.251.900	(629.173.985)
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.380.778.985	1.380.778.985	(629.173.985)
5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.634.286.000	2.634.286.000	-
5.2.3.09.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.064.775.000	1.064.775.000	-
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	246.389.700	246.389.700	-
5.2.3.25.	Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	3.277.108.500	3.223.199.500	(53.909.000)
5.2.3.25.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	495.863.000	495.863.000	(7.560.000)
5.2.3.25.04.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	2.062.288.200	2.062.288.200	(24.949.000)
5.2.3.25.07.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	42.313.000	42.313.000	(21.400.000)
5.2.3.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lainnya	10.155.238.915	10.155.238.915	-
<b>5.2.4.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>113.145.787.650</b>	<b>113.266.920.650</b>	<b>121.133.000</b>
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	63.760.044.025	63.760.044.025	-
5.2.4.02.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	9.781.684.850	9.781.684.850	-
5.2.4.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	12.786.394.000	12.786.394.000	-
5.2.4.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.025.950.000	6.025.950.000	-
5.2.4.07.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	94.285.000	94.285.000	-
5.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	818.334.850	818.334.850	-
5.2.4.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.037.714.100	4.037.714.100	-
5.2.4.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	5.330.720.000	5.330.720.000	-
5.2.4.11.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	289.210.000	289.210.000	-
5.2.4.12.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.446.034.850	3.446.034.850	-
5.2.4.18.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	1.202.551.000	1.202.551.000	-
5.2.4.20.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	50.250.000	50.250.000	-
5.2.4.21.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	435.192.000	435.192.000	-
5.2.4.23.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	45.000.000	45.000.000	-
5.2.4.30.	Belanja Modal Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.702.238.125	4.823.371.125	121.133.000
5.2.4.30.04.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.502.582.125	2.228.804.025	107.133.000
5.2.4.30.07.	Belanja Modal Perjalanan Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.000.000	14.000.000	14.000.000
5.2.4.99.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya	340.184.850	340.184.850	-

<b>5.2.5.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.660.394.300</b>	<b>2.365.765.900</b>	<b>(294.628.400)</b>
5.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	2.354.865.900	2.354.865.900	-
5.2.5.04.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	3.350.000	3.350.000	-
5.2.5.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	296.128.400	1.500.000	(294.628.400)
5.2.5.05.02	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air	294.628.400	-	(294.628.400)
5.2.5.15.	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6.050.000	6.050.000	-
<b>5.2.6.</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>438.320.000</b>	<b>438.320.000</b>	<b>-</b>
5.2.6.01.	Belanja Modal Aset Lainnya	438.320.000	438.320.000	-
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.810.000.000</b>	<b>3.810.000.000</b>	<b>-</b>
<b>5.3.1.</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.810.000.000</b>	<b>3.810.000.000</b>	<b>-</b>
5.3.1.01.	Belanja Tak Terduga	3.810.000.000	3.810.000.000	-
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>77.561.176.300</b>	<b>77.561.176.300</b>	<b>-</b>
<b>5.4.3.</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>77.137.015.300</b>	<b>77.137.015.300</b>	<b>-</b>
5.4.3.01.	Dana Desa dan Desa Adat	48.548.292.000	48.548.292.000	-
5.4.3.02.	Alokasi Dana Desa	28.588.723.300	28.588.723.300	-
<b>5.4.4.</b>	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>424.161.000</b>	<b>424.161.000</b>	<b>-</b>
5.4.4.01.	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	424.161.000	424.161.000	-
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>935.495.364.126</b>	<b>941.575.071.741</b>	<b>6.079.707.615</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.535.264.085)</b>	<b>(17.878.774.085)</b>	<b>(3.343.510.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			<b>-</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22.042.779.254</b>	<b>25.386.289.254</b>	<b>3.343.510.000</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</b>	<b>22.042.779.254</b>	<b>25.386.289.254</b>	<b>3.343.510.000</b>
6.1.1.05.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	22.042.779.254	25.386.289.254	3.343.510.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22.042.779.254</b>	<b>22.042.779.254</b>	<b>-</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.507.515.169</b>	<b>7.507.515.169</b>	<b>-</b>
<b>6.2.1.</b>	<b>PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO</b>	<b>7.515.169</b>	<b>7.515.169</b>	<b>-</b>
6.2.1.11.	Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya Kepada Lembaga Keuangan Bank	7.515.169	7.515.169	-
<b>6.2.2.</b>	<b>PENYERTAAN MODAL DAERAH</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>-</b>
6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000	7.500.000.000	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.507.515.169</b>	<b>7.507.515.169</b>	<b>-</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>14.535.264.085</b>	<b>17.878.774.085</b>	<b>3.343.510.000</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 24 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 5 AGUSTUS 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN

**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 1.02 - Kesehatan  
 Organisasi SKPD : 1.02.01 - Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)	PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	
1	2	3	4	5=4-3	7
5	BELANJA DAERAH				
1.02-1.02.01-06	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	<u>1.058.938.000</u>	<u>4.718.938.000</u>	<u>3.660.000.000</u>	
1.02-1.02.01-06.024	PELAYANAN PENANGANAN COVID-19	<u>0</u>	<u>3.660.000.000</u>	<u>3.660.000.000</u>	Sumber Dana : DAK Non Fisik BOK Lokasi : Kota Tidore Kepulauan Keluaran : Jumlah Petugas Kesehatan
05.01	BELANJA OPERASIONAL	<u>0</u>	<u>3.660.000.000</u>	<u>3.660.000.000</u>	
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.660.000.000	3.660.000.000	
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0	3.060.000.000	3.060.000.000	
5.1.2.03.13	Belanja Jasa Kesehatan	0	3.060.000.000	3.060.000.000	
5.1.2.25.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	600.000.000	600.000.000	
5.1.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0	600.000.000	600.000.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<u>56.756.167.306</u>	<u>60.416.167.306</u>	<u>3.660.000.000</u>	

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan  
Pemerintahan : 3.02 - Pariwisata  
Organisasi SKPD : 2.16.01 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)	PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	
1	2	3	4	5=4-3	7
5	BELANJA DAERAH				
3.02-2.16.01-05	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	4.890.687.000	3.951.924.615	(938.762.385)	
3.02-2.16.01-05.005	PEMBANGUNAN GAZEBO TEMPAT WISATA MAITARA (DAK)	161.684.270	159.794.270	(1.890.000)	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Pariwisata Lokasi : Tidore Utara Keluaran : jumlah gazebo yang dibangun
5.2.	BELANJA MODAL	161.684.270	159.794.270	(1.890.000)	
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.684.270	159.794.270	(1.890.000)	
5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	147.870.000	147.870.000	-	
5.2.3.02.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	147.870.000	147.870.000	-	
5.2.3.25.	Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	13.814.270	11.924.270	(1.890.000)	
5.2.3.25.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	1.890.000	-	(1.890.000)	
5.2.3.25.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	11.924.270	11.924.270	-	
3.02-2.16.01-05.011	PEMBANGUNAN TALUD TEMPAT WISATA MAITARA	1.266.298.000	1.261.678.000	(4.620.000)	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Pariwisata Lokasi : Tidore Utara, Maitara Utara Keluaran : Panjang talud yang terbangun
5.2.	Belanja Modal	1.266.298.000	1.261.678.000	(4.620.000)	
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.804.000	-	(97.804.000)	
5.2.3.25.	Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	97.804.000	-	(97.804.000)	
5.2.3.25.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	1.620.000	-	(1.620.000)	
5.2.3.25.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	82.184.000	-	(82.184.000)	
5.2.3.25.07	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	14.000.000	-	(14.000.000)	
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.168.494.000	1.261.678.000	93.184.000	
5.2.4.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.168.494.000	1.168.494.000	-	
5.2.4.04.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.168.494.000	1.168.494.000	-	
5.2.4.30.	Belanja Modal Perolehan Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	93.184.000	93.184.000	
5.2.4.30.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	82.184.000	82.184.000	
5.2.4.30.07	Belanja Modal Perjalanan Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	11.000.000	11.000.000	
3.02-2.16.01-05.023	PEMBANGUNAN DIVE CENTER DAN PERALATANNYA	983.776.385	53.624.000	(930.152.385)	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Pariwisata Lokasi : Tidore Utara, Tuguwaji, Maitara Utara Keluaran : Jumlah bangunan yang terbangun dan peralatan diving yang tersedia
5.2.	Belanja Modal	983.776.385	53.624.000	(930.152.385)	
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	689.147.985	53.624.000	(635.523.985)	
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	629.173.985	-	(629.173.985)	
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	629.173.985	-	(629.173.985)	
5.2.3.25.	Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	59.974.000	53.624.000	(6.350.000)	
5.2.3.25.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	1.350.000	-	(1.350.000)	
5.2.3.25.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	53.624.000	53.624.000	-	
5.2.3.25.07	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	5.000.000	-	(5.000.000)	
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	294.628.400	-	(294.628.400)	
5.2.5.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	294.628.400	-	(294.628.400)	
5.2.5.05.02	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air	294.628.400	-	(294.628.400)	

3.02-2.16.01-05.027	<b>PEMBANGUNAN PEDESTRIAN TEMPAT WISATA MAITARA (DAK)</b>	<b>336.870.500</b>	<b>338.520.500</b>	<b>1.650.000</b>	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Pariwisata Lokasi : Maitara Kec.Tidore Utara Keluaran : Panjang Pedestrian yang terbangun
5.2.	Belanja Modal	336.870.500	338.520.500	1.650.000	
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.299.000	-	(26.299.000)	
5.2.3.25.	Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	26.299.000	-	(26.299.000)	
5.2.3.25.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	1.350.000	-	(1.350.000)	
5.2.3.25.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	24.949.000	-	(24.949.000)	
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	310.571.500	338.520.500	-	
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	310.571.500	310.571.500	-	
5.2.4.01.05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	310.571.500	310.571.500	-	
5.2.4.30.	Belanja Modal Perolehan Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	27.949.000	27.949.000	
5.2.4.30.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	24.949.000	24.949.000	
5.2.4.30.07	Belanja Modal Perjalanan Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	3.000.000	3.000.000	
3.02-2.16.01-05.028	<b>PEMBANGUNAN TOILET/KAMAR BILAS TEMPAT WISATA MAITARA (DAK)</b>	<b>622.088.845</b>	<b>618.338.845</b>	<b>(3.750.000)</b>	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Pariwisata Lokasi : Maitara Kec.Tidore Utara Keluaran : Jumlah bangunan terbangun
5.2.	Belanja Modal	622.088.845	618.338.845	(3.750.000)	
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	622.088.845	618.338.845	(3.750.000)	
5.2.3.25.	Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	51.783.730	48.033.730	(3.750.000)	
5.2.3.25.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	1.350.000	-	(1.350.000)	
5.2.3.25.04	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	42.120.730	42.120.730	-	
5.2.3.25.07	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	8.313.000	5.913.000	(2.400.000)	
5.2.3.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lainnya	570.305.115	570.305.115	-	
5.2.3.99.03	Bangunan Fasilitas Umum	570.305.115	570.305.115	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.347.355.000</b>	<b>1.408.592.615</b>	<b>(938.762.385)</b>	

**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : 3.01 - Kelautan dan Perikanan  
 Pemerintahan : 3.01.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Organisasi SKPD : 3.01.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)	PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	
1	2	3	4	5=4-3	7
5	BELANJA DAERAH				
3.01-3.01.01-03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA	448.000.000	448.000.000	-	
3.01-3.01.01-03.001	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN DAN UDANG - PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA UDANG VANAME (DAK)	178.000.000	178.000.000	-	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Lokasi : Kec. Tidore Timur Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana budidaya ikan dan Udang (Unit)
5.1.	Belanja Operasional	178.000.000	178.000.000	-	
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000	178.000.000	-	
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	178.000.000	178.000.000	-	
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	178.000.000	178.000.000	-	
3.01-3.01.01-04	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP	6.573.980.000	6.573.980.000	-	
3.01-3.01.01-04.002	PEMBANGUNAN KAPAL PERIKANAN - PENGADAAN ARMADA 2 GT (DAK)	4.066.480.000	4.066.480.000	-	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Lokasi : Tidore Selatan, Tidore Utara, Tidore, Tidore Timur, Oba, Oba Selatan, Oba Utara, Oba Tengah Keluaran : Jumlah Kapal Yang diadakan
5.1.	Belanja Operasional	4.066.480.000	4.066.480.000	-	
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.066.480.000	4.066.480.000	-	
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.066.480.000	4.066.480.000	-	
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.066.480.000	4.066.480.000	-	
3.01-3.01.01-08.006	PENUNJANG FISIK DAK	113.400.000	113.400.000	-	Sumber Dana : DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Lokasi : SKPD Keluaran : Tersedianya Penunjang Fisik DAK
5.1.	Belanja Operasional	113.400.000	113.400.000	-	
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.400.000	113.400.000	-	
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.700.000	86.700.000	-	
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.700.000	86.700.000	-	
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	26.700.000	26.700.000	-	
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.700.000	26.700.000	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.609.097.400</b>	<b>13.609.097.400</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)	PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	
1	2	3	4	5=4-3	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>857.669.710.158</b>	<b>764.545.562.302</b>	-	
<b>4.2.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	849.588.070.856	852.324.268.471	2.736.197.615	
<b>4.2.1.01.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	773.880.312.856	776.616.510.471	2.736.197.615	
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum	602.187.400.856	602.187.400.856	-	
4.2.1.01.02	Dana Transfer Khusus	171.692.912.000	174.429.109.615	2.736.197.615	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>877.216.310.158</b>	<b>874.480.112.543</b>	<b>(2.736.197.615)</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			-	
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	22.042.779.254	22.042.779.254	-	
<b>6.1.1.</b>	<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</b>	22.042.779.254	22.042.779.254	-	
<b>6.1.1.05.</b>	<b>Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya</b>	22.042.779.254	22.042.779.254	-	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	22.042.779.254	22.042.779.254	-	
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	7.507.515.169	7.507.515.169	-	
<b>6.2.1.</b>	<b>PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO</b>	7.515.169	7.515.169	-	
<b>6.2.1.11.</b>	<b>Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya Kepada Lembaga Keuangan Bank</b>	7.515.169	7.515.169	-	
<b>6.2.2.</b>	<b>PENYERTAAN MODAL DAERAH</b>	7.500.000.000	7.500.000.000	-	
<b>6.2.2.02.</b>	<b>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	7.500.000.000	7.500.000.000	-	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	7.507.515.169	7.507.515.169	-	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-	

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 5.01 - Sekretariat Daerah  
Organisasi SKPD : 5.01.01 - Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -)	PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh	Rp	
1	2	3	4	5=4-3	7
00.00	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5.01-5.01.01-12	<b>PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN</b>	<b>6.436.343.000</b>	<b>6.206.486.000</b>	<b>-229.857.000</b>	
5.01-5.01.01-12.001	<b>STQ/MTQ TINGKAT PROPINSI (BAGIAN BINA KESRA)</b>	<b>479.857.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-229.857.000</b>	Sumber Dana : DAU Lokasi : Luar Daerah Keluaran : -
05.01	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>479.857.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-229.857.000</b>	
05.01.01	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>172.000.000</b>	<b>96.000.000</b>	<b>-76.000.000</b>	
5.1.1.08.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>36.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-24.000.000</b>	
5.1.1.08.05	Honorarium Tim	4.000.000	0	-4.000.000	
5.1.1.08.06	Honorarium Petugas / Penjaga	32.000.000	12.000.000	-20.000.000	
5.1.1.09.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>136.000.000</b>	<b>84.000.000</b>	<b>-52.000.000</b>	
5.1.1.09.02	Honorarium peserta kegiatan	120.000.000	75.000.000	-45.000.000	
5.1.1.09.05	Honorarium Petugas / Penjaga	16.000.000	9.000.000	-7.000.000	
05.01.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>307.857.000</b>	<b>154.000.000</b>	<b>-153.857.000</b>	
5.1.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>812.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-712.000</b>	
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	812.000	100.000	-712.000	
5.1.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000	0	-2.500.000	
5.1.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	
5.1.2.03.13	Belanja Jasa Kesehatan	2.000.000	0	-2.000.000	
5.1.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.920.000</b>	<b>600.000</b>	<b>-3.320.000</b>	
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	3.700.000	600.000	-3.100.000	
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.000	0	-220.000	
5.1.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>69.150.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>-21.150.000</b>	
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	69.150.000	48.000.000	-21.150.000	
5.1.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>34.000.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>-7.200.000</b>	
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000	22.000.000	-6.000.000	
5.1.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000	4.800.000	-1.200.000	
5.1.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</b>	<b>112.325.000</b>	<b>49.000.000</b>	<b>-63.325.000</b>	
5.1.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	112.325.000	49.000.000	-63.325.000	
5.1.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>47.300.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>-29.800.000</b>	
5.1.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	14.000.000	17.500.000	3.500.000	
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.000.000	0	-8.000.000	
5.1.2.14.07	Belanja pakaian semi jas	24.000.000	0	-24.000.000	
5.1.2.14.09	Belanja atribut pakaian	1.300.000	0	-1.300.000	
5.1.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.850.000</b>	
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.850.000	0	-7.850.000	
5.1.2.24.	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>28.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	
5.1.2.24.03	Belanja Instruktur	28.000.000	12.000.000	-16.000.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>51.614.526.653</b>	<b>51.384.669.653</b>	<b>-229.857.000</b>	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM